

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



DENGAN UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN , PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, KEGIATAN KEMAHASISWAAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELATIHAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Nomor: 147.543/47/KSB/PEM-LT/VII/2022

Nomor: 1639/R/UNCP/VII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BUDIMAN : Bupati Luwu Timur berkedudukan di jalan

Soekarno Hatta Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu

Timur selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RAHMAN HAIRUDDIN : Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo

berkedudukan di Jalan Latammacelling No. 19 Kota Palopo, dalam hal ini bertindak atas

nama untuk Universitas Cokroaminoto Palopo

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Luwu Timur sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo sebagai penanggungjawab penyelenggara Penguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cokroaminoto Palopo.





Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kegiatan Kemahasiswaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Pembangunan Daerah dan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut;

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam rangka peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, pembangunan daerah, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan adalah meningkatkan hubungan kelembangan **PARA PIHAK** melalui program bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, pembangunan daerah, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur pada jenjang pendidikan S1 dan S2.
- b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penelitian, seminar, dan lokakarya.
- c. Penyelenggaraan kegiatan/pendampingan bagi satuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pengembangan kompetensi dan kualifikasi dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
- e. Pemberian subsidi bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa/ mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

- f. Bidang pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yakni kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yang meliputi bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain Kuliah Kerja Nyata Tematik, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, yang dilaksanakan selama 1 atau 2 semester.
- g. Penerapan hasil-hasil penelitian Pendidikan, Sains, Ketahanan Pangan, dan Teknologi Informasi.
- h. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.
- i. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- j. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

(4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundangundangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama dan bilamana perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musywarah, maka perbedaan pendapat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936

Telepon : (0474) 321005 Faksimili : (0474) 321005

Surat Elektronik (Email) : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id u.p.

Sekretariat Daerah

b. UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

Alamat : Jalan Latammacelling No. 19 Kota Palopo

Telepon : (0471) 22911 Faksimili : (0471) 325055 Surat Elektronik (Email) : rektor@uncp.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

RAHMAN HAIRUDDIN

PIHAK KESATU,

BUDIMAN

Pihak 2